



PERAN PSAK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Nurul Rafiqoh Lubis¹, Tsamara Balqis², Nurlaila³

nurulborlub27@gmail.com¹, tsamarabalqis.1504@gmail.com², nurlaila@uinsu.ac.id³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Lembaga keuangan syariah, baik yang berstatus bank atau non bank, dalam proses menyajikan “laporan keuangan” harus mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, apa saja Tantangan dalam Implementasi PSAK Syariah untuk Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan apa keuntungan dalam penerapan PSAK syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan data menggunakan rangkaian kalimat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang sumber datanya berupa kata-kata, gambar, dan data dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan PSAK Syariah. Adapun hasil penelitian ini ialah Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka setiap lembaga dari keuangan syariah disarankan untuk patuh dan mengacu pada PSAK syariah 101 terkait “penyajian laporan keuangan syariah”. PSAK syariah 101 dapat memberikan pengaturan mengenai syarat-syarat dari penyajian laporan keuangan, susunan/struktur laporan keuangan, dan juga berisi tentang syarat minimum mengenai jumlah isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

Keyword : PSAK syariah, kualitas laporan keuangan, laporan keuangan

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang merupakan wujud jasa dari profesi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Pada lembaga keuangan syariah, baik yang berstatus bank atau non bank, dalam proses pelaporan keuangan harus mengacu pada standar. akuntansi. keuangan. syariah agar laporan. keuangan yang dihasilkan berkualitas. “Standar Akuntansi Syariah” ialah Pernyataan Standar. Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diperuntukkan bagi entitas yang menjalankan kegiatan transaksi dalam konteks syariah. Standar ini dikembangkan dengan mengikuti SAK umum atau standar akuntansi keuangan umum dan mengacu pada fatwa MUI. Sebagai penyedia informasi, akuntansi akan memberikan informasi mengenai data keuangan yang sifatnya kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Hingga saat ini, DSAKS-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi :

1. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
4. PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
5. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 tentang akuntansi mudharabah
7. PSAK 107 tentang akuntansi musyarakah
8. PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah
9. PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah
10. PSAK 110 tentang akuntansi sukuk.

Pada proses penyajian laporan keuangan syariah harus akurat dengan standar akuntansi syariah yang menjadi solusi dalam menjaga akuntabilitas dari laporan keuangan. Standar akuntansi syariah merupakan pernyataan yang diterapkan pada penyajian dari laporan keuangan entitas syariah. maka laporan keuangan syariah disusun kemudian disajikan sesuai pada standar akuntansi keuangan (PSAK No.101). berdasarkan uraian diatas maka dituliskan ini mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana peran psak syariah dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.

Kajian Pustaka

Teori akuntansi syariah

Teori akuntansi syariah merupakan teori akuntansi yang ditujukan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan manusia dalam bidang pengelolaan harta yang diamankan terhadapnya kepada pihak yang memberi tanggung jawab dalam cara yang sesuai dan mematuhi syariah Allah SWT. Syariah Allah SWT terdiri atas aturan-aturan yang meliputi aspek akidah, hukum amaliah, dan akhlak. Akuntansi syariah dengan demikian harus pula mengandung ketiga unsur tersebut. Aspek akidah menjadikan

akuntansi syariah harus mengandung tauhid kepada Allah SWT. Aspek hukum amaliah menjadikan akuntansi syariah dilandasi oleh pemahaman untuk menjadikan perilaku berakuntansi memiliki nilai hak dan kewajiban, sanksi dan pahala yang ditafsirkan dari 'urf syaari' di dalam Al Quran dan As Sunnah. Akuntansi syariah dengan demikian harus mendorong perilaku yang bertauhid dan dijalankan atas dasar hukum amaliah yang diwakili oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum amaliah ini dilaksanakan untuk mewujudkan maqashid syariah. Perilaku seperti ini adalah sesuai syariah yaitu aspek akhlak.(Hadi, 2018)

Akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah mengandung unsur syariah dalam akuntansinya. Syariah dengan demikian menjadi dasar pijakan dalam meletakkan struktur teori akuntansi syariah. Syariah merupakan jalan yang bisa dilihat sebagai seperangkat aturan Allah SWT yang diturunkan dalam bentuk akidah, akhlak, dan hukum amaliah. Ketiga pondasi tersebut merupakan bagian dari agama Islam. Posisi akidah merupakan posisi yang paling tinggi disusul kemudian dengan hukum amaliah dan akhlak. Struktur teori akuntansi syariah yang baru memuat tauhid sebagai pondasi akidahnya kemudian hukum amaliah dan akhlak dengan mengonstruksi teori-teori akuntansi syariah dari Sofyan Syafrie Harahap, Iwan Triuwono, Aji Dedi Mulawarman dan IAI dengan urutan pertama yaitu Al Quran dan As Sunnah.

Psak Syariah

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2005:4) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. Pada penerapannya, akuntansi tidaklah mutlak melainkan dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi di setiap entitas berbeda-beda. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Oleh sebab itu, setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada PSAK.

PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, PSAK juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Keberadaan PSAK yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang akurat, relevan dan dapat dipercaya. Hingga saat ini, DSAKS-IAI telah menerbitkan sepuluh PSAK untuk entitas syariah yaitu 1). PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2) PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. 3) PSAK 103 tentang Akuntansi Salam. 4) PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna 5) PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. 6) PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah 7) PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah 8) PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah 9) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah 10) PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk.

Dalam PSAK 101 dijelaskan bahwa laporan keuangan bank syariah disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan penghitungan pendapatan

tersedia untuk bagi hasil pada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Terkait materialitas, bank syariah menyajikan setiap kelompok pos serupa yang material secara terpisah. Atas pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa juga disajikan secara terpisah, kecuali pos tersebut tidak material. Dalam menyusun laporan keuangan, bank syariah tidak boleh melakukan saling hapus terhadap aset, liabilitas, dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali saling hapus tersebut disyaratkan atau diizinkan oleh PSAK. (Razak & Firmansyah, 2021)

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Fauziah Hanum, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh (Razak & Firmansyah, 2021), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan diantaranya ialah :

- a. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu wilayah di Kota Semarang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
- b. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 58,7%. Sedangkan 41,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
- c. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner serta kepedualian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadieni & Qizam, 2019) Semakin baik PSAK maka akan semakin baik pula kualitas dari penyajian laporan keuangan syariah diterima, semakin baik audit syariah maka akan semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan syariah, semakin baik dari pengawasan syariah maka akan semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan syariah.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2022), ia menyimpulkan bahwa setiap lembaga keuangan yang berprinsip syariah harus memahami standar akuntansi keuangan syariah. Agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, lembaga keuangan syariah dapat berpedoman pada PSAK syariah 101. Dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap PSAK syariah 101, maka penyajian laporan keuangan perusahaan akan terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami, relevan, dapat dibandingkan dan dapat diandalkan. (Marheni, 2016)

Ayumiati (2018) mengatakan bahwa Dalam penyajian laporan keuangan secara akuntabilitas pihak Baitul Mal Kota Langsa belum menerapkan sistem penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang bertujuan untuk pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada transaksi zakat karena laporan keuangan itu sendiri harus siap di

audit oleh pihak internal maupun eksternal. transparansi pada Baitul Mal Kota Langsa yaitu keterbukaan dalam informasi yang menyangkut tentang laporan keuangan, periode pelaporan. Dalam menerapkan transparansi ini pihak Baitul Mal Kota Langsa melaporkan rencana kerja tahunan, laporan penerimaan zakat dalam buku laporan penerimaan dan penyaluran zakat. (Ayumiati, 2018)

Ikhsan Abdullah (2022) mengatakan bahwa Akuntansi Murabahah didalam aplikasinya atau penerapannya diatur didalam PSAK No. 102. Standar akuntansi jual beli Murabahah diatur dalam PSAK 102 yaitu masalah Akuntansi yang berkaitan tentang penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran Murabahah yang dapat diaplikasikan ke lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah sesuai ketentuan yang berikan dan dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Menurut PSAK 102 (IAI, 2016), diskon murabahah terkait dengan pembelian Aktiva meliputi segala bentuk diskon untuk pembelian barang dari pemasok, dan diskon biaya asuransi yang dibeli dari perusahaan asuransi ketika membeli Aktiva dan segala bentuk komisi yang diterima terkait dengan pembelian Aktiva. Diskon untuk pembelian yang diterima setelah kontrak murabahah akan ditangani sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Jika tidak ditentukan dalam kontrak, diskon merupakan hak penjual. (Abdullah et al., 2022)

Metodologi penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang mendeskripsikan data menggunakan rangkaian kalimat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang sumber datanya berupa kata-kata, gambar, dan data dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Jadi penggunaan metode ini tidak menghasilkan data berupa angka, tetapi data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini menggunakan data tulisan yang bersumber dari buku jurnal ilmiah dan penelitian terhadulu.

Hasil Penelitian

Peraturan dan standar akuntansi di Indonesia belum sepenuhnya mencakup aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. PSAK (Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak secara eksplisit menangani aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun DSAK telah mengeluarkan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Syariah pada tahun 2009, hal ini hanya memberikan panduan mengenai akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. PSAK No. 105 lebih berfokus pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam hal aspek keuangan yang lebih luas, termasuk pengelolaan dana dalam sistem perbankan syariah, masih terdapat kebutuhan untuk lebih banyak penyesuaian dan pengembangan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah.

PSAK syariah digunakan dalam organisasi yang memiliki kebijakan Syariah dalam kegiatan usahanya. Badan yang mengatur PSAK Syariah adalah Dewan Standar Akuntansi Syariah dari Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). PSAK ini secara konseptual dibangun, namun dalam penerapannya dapat digunakan PSAK umum. Karena ada bank

syariah dengan kewajiban publik, maka perlu untuk menyusun laporan mereka melalui PSAK umum dan kemudian menghubungkannya dengan SAK Syariah sebagai transaksi.

Pembahasan

Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Menurut kabib (2021) laporan keuangan yang memiliki kualitas sangatlah penting dihasilkan karena laporan keuangan yang berkualitas selain bisa memberikan berbagai informasi keuangan perusahaan yang jujur, baik dan benar juga bisa mempermudah dalam proses pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan tersebut, baik oleh perusahaan itu sendiri, calon investor maupun pengguna-pengguna lain. (Kabib et al., 2021)

Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka setiap lembaga dari keuangan syariah disarankan untuk patuh dan mengacu pada PSAK syariah 101 terkait “penyajian laporan keuangan syariah”. PSAK syariah 101 dapat memberikan pengaturan mengenai syarat-syarat dari penyajian laporan keuangan, susunan/struktur laporan keuangan, dan juga berisi tentang syarat minimum mengenai jumlah isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Dalam PSAK syariah 101 juga tertera dengan jelas mengenai penjabaran lengkap mengenai struktur dari laporan keuangan syariah yang terdiri dari :

1. Kinerja/posisi keuangan

Entitas syariah menyajikan asset lancar terpisah dengan asset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Asset lancar disajikan menurut urutan jatuh temponya. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap asset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.

2. Laba rugi

Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalam memahami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yang akan diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan laporan keuangan laba rugi secara wajar.

3. Pergantian/perubahan ekuitas

Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik serta saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.

4. Arus kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar akuntansi Keuangan. Laporan arus kas merupakan laporan mengenai keluar masuknya kas selama periode tertentu. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam

menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut

5. Masukan dan keluaran dana zakat

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan.

6. Sumber masukan dan pemakaian uang kebajikan

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan.

Dengan demikian, apabila entitas syariah mengacu pada PSAK syariah 101 dalam penyajian laporan keuangannya maka bisa dipastikan laporan keuangan yang disajikan bisa lebih terstruktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dapat dengan mudah dipahami, relevan dapat di jadikan bahan pembanding dan dapat diandalkan.

Tantangan dalam Implementasi PSAK Syariah untuk Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Dalam mengimplementasikan PSAK syariah ada beberapa tantangan yang harus diatasi guna meningkatkan kualitas dari penyajian laporan keuangan syariah tersebut. Beberapa tantangannya ialah antara lain (Prabowo, M. A. 2020) :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia: Keterbatasan kompetensi dan pemahaman tentang PSAK Syariah pada sumber daya manusia di perusahaan syariah dapat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan syariah. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait PSAK Syariah melalui pelatihan dan pengembangan.
2. Ketersediaan Data dan Informasi: Beberapa perusahaan syariah mungkin belum memiliki sistem akuntansi yang memadai untuk memenuhi persyaratan PSAK Syariah. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan syariah.
3. Perbedaan Interpretasi PSAK Syariah: PSAK Syariah terkadang memiliki interpretasi yang berbeda-beda bagi para praktisi dan pengamat keuangan syariah. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan konsultasi dengan ahli syariah dan regulator untuk memastikan interpretasi yang benar dan konsisten.
4. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penyajian laporan keuangan syariah, namun tidak semua perusahaan syariah mampu menginvestasikan dana yang besar untuk teknologi tersebut.
5. Penerapan Standar Internasional: PSAK Syariah juga mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS). Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami dan menerapkan standar internasional dalam penyajian laporan keuangan syariah.

6. Perubahan Regulasi: Perusahaan perlu terus memantau perubahan regulasi terkait PSAK Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu melakukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan syariah, termasuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki sistem akuntansi, melakukan konsultasi dengan ahli syariah dan regulator, menggunakan teknologi yang tepat, memahami dan menerapkan standar internasional, serta memantau perubahan regulasi terkait PSAK Syariah.

Keuntungan dalam penerapan PSAK syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

Dalam penerapan PSAK syariah memiliki beberapa keuntungan yang bisa meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan syariah, diantaranya ialah (Sukmana, R., & Sari, S. P., 2020) :

1. Menjamin Kepastian Hukum: PSAK Syariah memberikan kepastian hukum terkait dengan akuntansi syariah. Dalam implementasinya, PSAK Syariah mengacu pada Al-Quran, Hadits, dan fatwa ulama, sehingga perusahaan syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penyajian laporan keuangan.
2. Meningkatkan Kredibilitas: Dengan menerapkan PSAK Syariah, perusahaan syariah dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan syariah yang disajikan. Hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan masyarakat.
3. Meningkatkan Transparansi: PSAK Syariah memerlukan pengungkapan yang lebih transparan dan jelas dalam laporan keuangan syariah. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan terperinci kepada pemangku kepentingan.
4. Memperkuat *Good Governance*: PSAK Syariah mendorong perusahaan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan dan aset. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Peraturan dan standar akuntansi di Indonesia belum sepenuhnya mencakup aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. PSAK (Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak secara eksplisit menangani aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun DSAK telah mengeluarkan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Syariah pada tahun 2009, hal ini hanya memberikan panduan mengenai akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. PSAK No. 105 lebih berfokus pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah

Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka setiap lembaga dari keuangan syariah disarankan untuk patuh dan mengacu pada PSAK syariah 101 terkait

“penyajian laporan keuangan syariah”. PSAK syariah 101 dapat memberikan pengaturan mengenai syarat-syarat dari penyajian laporan keuangan, susunan/struktur laporan keuangan, dan juga berisi tentang syarat minimum mengenai jumlah isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Dalam pengimplementasian PSAK syariah ada beberapa tantangan yang harus diatasi agar dapat meningkatkan kualitas dari penyajian laporan diantaranya ialah 1) kompetensi sumber daya manusia 2) ketersediaan data dan informasi 3) perbedaan interpretasi PSAK syariah 4) penggunaan teknologi 5) penerapan standar internasional 6) perubahan regulasi.

Dalam penerapan PSAK syariah dapat memberikan beberapa keuntungan di antaranya ialah 1) menjamin kepastian hukum 2) meningkatkan kredibilitas 3) meningkatkan transparansi transaksi, PSAK Syariah memerlukan pengungkapan yang lebih transparan dan jelas dalam laporan keuangan syariah. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan terperinci kepada pemangku kepentingan. 4) memperkuat *good governance*. PSAK Syariah mendorong perusahaan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan dan aset. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemangku kepentingan.

Saran

Dalam penyajian laporan keuangan PSAK harus memahami prinsip dasar PSAK Syariah yang mana nantinya dalam menyusun laporan keuangan bisa memenuhi standar dan kualitas yang diharapkan. Demikian penelitian ini di buat. Penulis menyadari bahwa penelelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar kedepannya bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi. Juga diharapkan agar tulisan ini bisa menjadi bahan ajar dan bahan materi dalam pembelajaran dalam perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Tumanggor, A. H., & Siregar, S. (2022). Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102 (Studi Reguler). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(102), 1349–1358.
- Ayumiati, A. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Baitulmal Kota Langsa). *Ekobis Syariah*, 2(2), 35. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10105>
- Fauziah Hanum. (2020). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan*.
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106–123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Kabib, N., Hayati, S. N., & Fatimatuzzahra, S. (2021). Apakah Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumberdaya Manusia serta Peran Auditor Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 473–481. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1335>

- Marheni. (2016). *PERAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN*. 3(1), 1–23.
- Rahmadieni, R. Y., & Qizam, I. (2019). Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>
- Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia: Sudah Sesuai dengan PSAK 101? *Syi`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 143. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290>
- Sukmana, R., & Sari, S. P. (2020). The Effect of Shari'ah Accounting Standards on the Quality of Financial Reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 267-282.